



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : DEWI IMELDA SARI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
3. NHK : 121164

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 836.965.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m<sup>2</sup>/21 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 64.965.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m<sup>2</sup>/70 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 302.000.000
3. Bangunan Seluas 33 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
4. Tanah Seluas 195 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah Seluas 285 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 184.000.000**

1. MOBIL, KIA PICANTO MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. MOTOR, YAMAHA MZ 135 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
5. LAINNYA, SEPEDA MARIN Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000



6. LAINNYA, SEPEDA FNHON Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.  
9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	283.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	103.210.500
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	214.052.257
F. HARTA LAINNYA	Rp.	22.738.317
Sub Total	Rp.	1.644.466.074
III. HUTANG	Rp.	162.875.424
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.481.590.650

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.